

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis peneliti, maka peneliti memiliki kesimpulan yang sesuai dengan pertanyaan penelitian mengenai proses terjadinya konflik politik di Kabupaten Solok. Aktor yang terlibat dalam konflik politik yang terjadi di Kabupaten Solok tahun 2021 adalah Bupati Solok, Wakil Bupati Solok, Ketua DPRD Kabupaten Solok, dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok. Konflik politik di Kabupaten Solok dimulai dengan renggangnya hubungan personal Bupati dengan Ketua DPRD Kabupaten Solok yang disebabkan oleh adanya penyebaran video ujaran kebencian tentang sosok Ketua DPRD Kabupaten Solok oleh Bupati Solok. Konflik berlanjut dengan retaknya hubungan Bupati Solok dengan Wakil Bupati Solok disebabkan oleh adanya pernyataan dukungan Wakil Bupati Solok terhadap Ketua DPRD Kabupaten Solok atas konflik yang terjadi dengan membawa kepentingan kepartaian. Setelah masalah Bupati dengan Ketua DPRD Kabupaten Solok berjalan, muncul konflik baru yaitu antara Ketua DPRD Kabupaten Solok dengan wakilnya.

Konflik antara Ketua dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok ini dipicu oleh sikap Ketua DPRD Kabupaten Solok yang dinilai arogan dan sering mengabaikan asas kolektif kolegial dalam memimpin oleh Wakilnya dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Solok lainnya. Masalah yang terjadi di dalam tubuh DPRD Kabupaten Solok ini menghasilkan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Kabupaten Solok yang ditandatangani oleh dua puluh dua orang anggota

DPRD Kabupaten Solok. Hasil dari mosi tidak percaya ini adalah pemecatan Ketua DPRD Kabupaten Solok oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok, namun Gubernur Sumatera Barat tidak menerima keputusan Badan Kehormatan tersebut sehingga Ketua DPRD Kabupaten Solok tidak jadi kehilangan jabatannya.

Konflik politik yang terjadi di Kabupaten Solok tahun 2021 hadir atas dasar inisiasi perseorangan yang memiliki objektivitas ketidaksukaan terhadap perseorangan dalam lembaga atau bisa disebut dengan sebab-sebab individual. Kepentingan partai penguasa di tingkat daerah menjadi faktor dasar yang menyebabkan konflik berlanjut ke arah yang lebih luas. Kepentingan partai ini merupakan sebab-sebab kolektif dalam terjadinya konflik politik antar lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di Kabupaten Solok tahun 2021. Sikap arogan dan egois masing-masing aktor yang terlibat konflik membuat konflik politik sampai pada tahap yang rumit untuk diselesaikan. Perbedaan latar belakang pendidikan dan perbedaan partai politik membuat interaksi antar aktor yang berkonflik menjadi terbatas.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah konflik politik yang terjadi di Kabupaten Solok tahun 2021 disebabkan oleh adanya sebab-sebab individual seperti ketidaksukaan Bupati terhadap pribadi Ketua DPRD Kabupaten Solok dan Wakil Bupati Solok. Konflik ini juga disebabkan oleh adanya sebab-sebab kolektif kelembagaan yaitu adanya kepentingan partai politik di dalam konflik antar lembaga pemerintah Kabupaten Solok tahun 2021. Dampak yang ditimbulkan dari konflik politik antara lembaga eksekutif dan legislatif cukup

besar. Retaknya hubungan sosial antar aktor yang terlibat konflik terlihat jelas selama konflik berjalan. Kerusakan beberapa fasilitas negara akibat dari kericuhan pada rapat paripurna pembahasan RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021 menjadi penanda bahwa konflik politik antar lembaga ini berlangsung alot. Dominasi dari kelompok yang banyak pengikutnya di dalam konflik yaitu kelompok pendukung Bupati Solok adalah simbol kekalahan dari Dodi Hendra selaku Ketua DPRD Kabupaten Solok dan Jon Firman Pandu selaku Wakil Bupati Solok.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan tentang analisis konflik politik antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di Kabupaten Solok tahun 2021, ada beberapa saran yang Peneliti kemukakan untuk penelitian selanjutnya baik saran, sebagai berikut:

1. Konflik politik di Kabupaten Solok tahun 2021 dapat terselesaikan dengan cepat apabila ada salah satu pihak atau aktor yang mau dan mampu untuk mengenyampingkan ego kepartaian dan personal dalam konflik.
2. Dikarenakan batasan peneliti dalam penelitian untuk dapat melihat konflik secara lebih mendalam, maka perlu diadakan penelitian lanjutan mengenai konflik politik yang terjadi di Kabupaten Solok dengan informan yang lebih dan dengan perspektif yang berbeda.